



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**PANJA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
KOMISI IX DPR RI**

**(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, DJSN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2011-2012
Masa Persidangan : IV
Jenis Rapat : RDP Panja Jamkesmas
Dengan : 1. Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI;
2. Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kemenkes RI;
3. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes RI.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Selasa, 12 Juni 2012
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Acara : 1. Membahas perkembangan mekanisme rujukan dan sistem pelayanan program Askeskin 2005 – 2007 dan program Jamkesmas 2008 – sekarang;
2. Membahas sistem pendataan kepesertaan program Askeskin 2005 – 2007 dan program Jamkesmas 2008 –sekarang;
3. Membahas sistem pembiayaan dan laporan penggunaan anggaran program Askeskin 2005 – 2007 dan program Jamkesmas 2008 – sekarang;
4. Membahas rencana strategis Kementerian Kesehatan RI untuk mempersiapkan pengalihan program Jamkesmas ke BPJS Kesehatan pada tanggal, 1 Januari 2014;
5. Membahas mekanisme penentuan premi per orang.
Ketua Rapat : Ir. Soepriyatno/ Ketua Panja Jamkesmas Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir : 23 orang dari 27 orang Anggota Panja Jamkesmas, 1 orang izin

II. KESIMPULAN

1. Panja Jamkesmas Komisi IX DPR RI akan mendalami permasalahan-permasalahan penyelenggaraan Program Jamkesmas berdasarkan Paparan dan Jawaban Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, antara lain sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Program Jamkesmas :
 - Data kepesertaan yang masih belum akurat.
 - Pengelolaan pembiayaan program Jamkesmas yang belum optimal.
 - Sosialisasi program Jamkesmas belum merata.
 - Masih adanya biaya tambahan yang ditanggung oleh peserta Jamkesmas.
 - Masih ada sikap mental aparat kesehatan yang belum memihak orang miskin.
 - Aksesibilitas masih rendah termasuk Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) dan SDM Kesehatan, terutama di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
 - Belum optimalnya peran Puskesmas.
 - b. Persiapan peralihan program Jamkesmas ke BPJS Kesehatan :
 - Kriteria penentuan orang miskin dan tidak mampu yang berhak menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI).
 - Dasar penentuan premi BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI).
 - Sosialisasi dalam rangka persiapan beroperasinya BPJS Kesehatan belum maksimal dan merata.
 - Kewajiban pemerintah untuk menyiapkan fasilitas dan SDM kesehatan sesuai dengan prediksi ketika BPJS Kesehatan beroperasi.
2. Panja Jamkesmas Komisi IX DPR RI akan mendalami tahapan peralihan Jamkesmas ke BPJS Kesehatan yang diajukan Kementerian Kesehatan RI, sebagai berikut :
 - Kementerian Kesehatan RI akan menugaskan PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara Jamkesmas Tahun 2013 bila ada dukungan anggaran operasional.
 - Penyerahan pengelolaan Jamkesmas kepada BPJS Kesehatan terhitung mulai 1 Januari 2014 dengan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dana saldo pada seluruh PPK Jaringan Jamkesmas.